

DINAMIKA KONFLIK PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) TAHUN 2013-2015 DI PROVINSI RIAU

Oleh:

Maya Friscilia

Email: maya_friscilia@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The research aims to see the Dynamics of Conflict of the Golkar Party in 2013-2015 In Riau Province, and the focus of this research is how the political dynamics conducted by the Golongan Karya party from 2013 to 2015 until the consolidation phase of the Golongan Karya party. This research uses descriptive qualitative method. Analysis of data presented in the form of qualitative that describes the actual situation in detail and actual by looking at the problem and research objectives. The study was conducted by interviewing informants who really understood with the problems of research that became the object of information that aims to achieve goals and obtain information in this study.

This study examines the internal conflicts that occurred in the Golkar Party in 2013-2015. This conflict began with the Government's power along with Golkar that led to totalitarianism, bringing disappointment in society. Therefore, Golkar organizes an extraordinary national deliberation (munaslub) as an effort to fix the Golkar institute. In the munaslub, was elected Setya Novanto as chairman of the Golkar Party. Thus, the existence of Golkar Party continues, although there are some basic changes such as in its vision and mission: open, independent, democratic, moderate, entrenched, and responsive. When examined in terms of institutional, or analysis of the conflict that occurred in the Golkar Party, then it reflects the party only wants to achieve the benefits and personal interests.

Keywords: Dynamics, Political Conflict, Political Parties, Leadership

PENDAHULUAN

Partai politik adalah alat perjuangan masyarakat untuk menduduki pemerintahan, dimana anggota-anggotanya terorganisir dan terbentuk dari pandangan mengenai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Salah satu indikator dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu. Keberadaan partai politik sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut karena sesungguhnya di dalam sebuah partai masih terdapat perbedaan orientasi, cita-cita, nilai dan kehendak masing-masing individu. Inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam partai yang saat ini banyak terjadi. Konflik tidak bisa dihindarkan karena sejauh berdirinya sebuah partai pasti terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 1 tentang partai politik, definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pujriyani dalam Mardihartono (2014: 56) menyatakan konflik adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan baik dari individu maupun kelompok tertentu.

Sebagai wujud dari gejala sosial, konflik memang akan selalu ada pada setiap kehidupan karena antagonisme atau perbedaan yang menjadikan ciri penunjang terbentuknya suatu masyarakat sehingga perbedaan memang tidak bisa dihindari. Hal di atas tersebut menjelaskan konflik menjadi salah satu karakteristik dalam kehidupan manusia yang sudah ada sejak dahulu sampai era globalisasi sekarang ini yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial

Terselenggaranya dua Musyawarah Nasional (Munas) di dalam Partai Golkar. Munas yang satu berlangsung di Bali dan yang satu berlangsung di Jakarta. Munas Partai Golkar terjadi di tempat dan waktu yang berbeda serta memberikan hasil struktur kepengurusan yang berbeda. Konflik internal di tubuh Golkar memanaskan seiring hasil pemilihan Presiden 2014 yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Golkar ketika itu mendukung Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden membuat Partai Beringin ini terbelah. Sebagian kader Golkar menginginkan partai ini mendukung pemerintahan terpilih. Di tahun yang sama, Golkar pun harus menggelar Munas 2014. Kubu pertama menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November - 4 Desember 2014 dan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Sementara kubu kedua menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum serta Zainuddin Amali

sebagai sekretaris jenderal. Masing-masing kubu mengklaim sebagai pengurus yang sah dan saling mengajukan gugatan.

Adanya konflik internal partai Golkar tentunya membawa dampak yang cukup besar terhadap perpolitikan di Indonesia terutama untuk Partai Golkar yang berada di daerah Provinsi maupun yang berada di daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Bagaimanapun kepengurusan yang ada di bawah kepengurusan pusat akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih konflik Partai Golkar mengalami proses yang lama. Penyebaran Partai Golkar pun merata ke seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki partisipasi politik yang banyak dari masyarakat. Oleh sebab itu perkembangan Partai Golkar di Provinsi Riau cukup pesat. Tentunya hal ini mempermudah untuk keluar masuknya informasi atau yang lainnya. Mengingat konflik yang disebabkan oleh Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang berakibat terhadap perpecahan. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap Partai Golkar yang ada di Provinsi Riau, baik dalam menjalankan kegiatan program kerja, pengambilan keputusan, struktur keorganisasian maupun pemicu untuk timbulnya konflik partai golkar yang ada di Provinsi Riau. Implikasi atau dampak dari konflik yang terjadi tentunya sangat besar untuk Partai Golkar itu sendiri. Baik dalam hal menjalankan kegiatan internal maupun eksternal partai. Bahkan dampak dari konflik tersebut akan merambat terhadap kinerja maupun kepengurusan yang ada di daerah-daerah

terutama di Provinsi Riau, serta tidak menutup kemungkinan timbul konflik dan perpecahan yang dibawa dari pusat terhadap kepengurusan daerah.

Dualisme kepengurusan Partai Golkar di pusat, saat ini mulai menjalar ke Riau. Saat ini, ada dua tokoh sentral yang dinilai akan bersaing untuk menjadi pucuk tertinggi partai berlambang pohon beringin di Bumi Lancang Kuning. Kedua sosok itu merupakan gambaran dari dua kubu yang bertikai saat ini di pusat. Yang pertama adalah Arsyadjuliandi Rachman yang juga Plt Gubernur Riau, pasca ditangkapnya Gubri nonaktif Annas Maamun. Sosok pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, adalah representasi dari kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan sosok lain, adalah mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Muchlis Adnan, yang saat ini mengklaim sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Partai Golkar, dari kubu Agung Laksono.

Dengan adanya dualisme kepengurusan parpol akan semakin mempersulit jalannya demokrasi elektoral di tingkat lokal, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Sudah akan menjadi konsekuensi logis dari perilaku partai politik terhadap persepsi masyarakat. Tindakan buruk yang tercermin dari gerak langkah partai politik ini tentu akan semakin memperburuk citra publik terhadap partai politik. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ataupun elite partai politik akan hilang. Tentu ini sangat merugikan bagi parpol, karena akan kehilangan konstituennya.

Konflik antara kedua kubu partai golkar ini mengarah kepada kepentingan

memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 2013-2015, Partai Golkar sedang mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik ini muncul karena adanya dua pengurus partai, sehingga membuat partai terpecah belah menjadi dua kubu. Hal ini tentu sangat mengganggu jalan kerja partai, sehingga konflik ini harusnya diakhiri dan kedua kubu harus mengambil keputusan yang bijaksana demi kebaikan partai Golkar sendiri. Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai dinamika konflik yang terjadi di dalam tubuh partai Golkar.

IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan dari fenomena yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah "Bagaimanakah Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2013-2015 di Provinsi Riau?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari informan, dan melakukan studi situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dengan berdasarkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penulis mengambil lokasi penelitian di Provinsi Riau dengan alasan ingin mengetahui Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2013-2015 di Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN

3.1.1. Friksi-friksi menjelang Pemilihan Gubernur

Tahun 2013 merupakan tahun politik, bertepatan tanggal 4 September 2013 ada pemilihan Gubernur di Provinsi Riau. Momentum pemilihan gubernur merupakan ajang kompetisi bagi partai politik untuk memajukan kader terbaiknya menjadi gubernur Riau. Segala kekuatan akan digerakkan oleh partai mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan sampai ke desa-desa. Mulai sekarang sudah menjadi keharusan bagi partai untuk mengerakkan mesin partai. Semakin panas mesin partai bergerak, maka akan semakin kencang kecepatannya untuk sampai kepada kemenangan.

Dari seluruh partai yang ada yang paling menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana dinamika di internal Partai Golkar Riau menjelang pemilihan gubernur di Provinsi Riau. Hasil musdalub dengan terpilihnya Annas Maamun secara aklamasi sebagai ketua DPD 1 Golkar menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan publik yang sebelumnya beberapa nama sempat disebut menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin seperti herman Abdullah, Syamsurizal, Sukarmis.

Penyusunan pengurus di bawah kepemimpinan Annas Maamun juga tidak lepas dari kritik yang datang di internal kader-kader Golkar. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua DPP partai Golkar Rusli Zainal yang mengkritisi tidak masuknya kader yang sudah mengakar di Golkar. Partai Golkar sebagai partai

pemenang pada pemilihan legislatif 2009 dengan jumlah kursi di DPRD Prov 16 dan mengantarkan kader terbaiknya H.M. Rusli Zainal menjadi Gubernur Riau. Sebagai partai besar sudah menjadi kewajaran ketika calon Gubernur yang diusung oleh partai berlambang beringin ini menjadi rebutan.

Menyongsong pilgubri 2013 yang lalu, seharusnya untuk konsolidasi internal partai Golkar sudah harus siap. Segala daya upaya mulai dari infrastruktur kemenangan dan strategi sudah harus matang. Terpilihnya Annas Maamun tentu menjadi angin segar bagi partai untuk kembali mengkonsolidasikan partai untuk lebih solid terutama menjelang Pilgubri yang sudah didepan mata. Apalagi pasca Musdalub banyak kader-kader tidak terkonsolidasikan dengan maksimal. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan di internal kader tentang siapa yang akan didukung oleh Golkar Riau untuk menjadi calon Gubernur.

Konflik di internal partai Golkar ini tentu harus dikelola dengan baik. Resolusi konflik merupakan tugas pokok partai. Ketika konflik dikelola dan kemudian mampu mensolidkan kader untuk menyongsong kemenangan tentu konflik sangat baik. Akan tetapi ketika konflik yang ada di internal partai tidak kemudian membuat kader partai semakin tidak solid bahkan lari ke lain hati tentu konflik seperti ini mendatangkan kerugian. Implikasi lebih besar, jika dalam kampanye Pilgubri terjadi benturan internal diinternal Golkar, bukan mustahil kader senior yang maju menggunakan para pendukung dari internal partai Golkar sendiri.

3.1.2. Friksi Menjelang Pemilihan Presiden

Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2013 lalu dan Pemilihan Presiden 2014, Partai Golkar di Provinsi Riau mengalami perpecahan, dimana adanya konflik antara 2 kubu yang bertikai, yakni Arsyadjuliandi Rachman dan Indra Muchlis Adnan. Kedua kubu tersebut saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Oleh sebab itulah terjadi friksi atau gesekan-gesekan yang terjadi di DPD Partai Golkar Provinsi Riau.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kesekretariatan Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsul mengatakan bahwa Kubu Arsyadjuliandi Rachman dan Indra Muchlis Adnan saling mempertahankan pilihannya masing-masing, akibatnya anggota partai Golkar terpecah, sehingga tidak adanya persatuan pada partai Golkar itu.

Akibat yang ditimbulkan karena adanya konflik dualisme kepemimpinan partai Golkar menjelang pemilihan Presiden yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan berkurangnya dukungan rakyat terhadap Partai Golkar.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Ruspan Aman meyakini persoalan beberapa kader Partai Golkar tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai menyambut Pemilu 2014 lalu. Partai berlambang pohon beringin tak akan terganggu. Ruspan menunjukkan keyakinan pada dualisme kepemimpinan itu juga tidak

memberikan dampak bagi perolehan suara Golkar dalam pemilihan Presiden 2014.

3.2. Persaingan dalam Merespon Konflik

Partai politik adalah salah satu wujud dari aktualisasi manusia dalam perannya sebagai makhluk sosial diatas. Selain itu, sebuah partai politik sebagai sebuah organisasi, layaknya organisasi lainnya juga memiliki arti penting terkait keberadaannya sebagai partai politik. Setidak-tidaknya untuk melayani masyarakat dan untuk mencapai sasaran yang tidak dapat dicapai/sulit dicapai seorang diri. Sebagai sebuah organisasi, ciri lain yang tidak bisa dipisahkan adalah adanya interaksi di antara anggota individu/kelompok. Sementara itu, ketika di dalam sebuah organisasi telah terjadi interaksi antar individu, maka terjadinya konflik adalah merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana dikatakan Lewis A. Coser (1972) bahwa konflik baik yang bersifat antar kelompok maupun intra-kelompok selalu ada di tempat orang hidup bersama.

Konflik dalam setiap peristiwa politik berakar pada perebutan kekuasaan, sebab itu “Kuasa” merupakan kata kunci untuk melihat lebih jauh sumber-sumber konflik yang terjadi. Pertarungan kekuatan-kekuatan politik merupakan pencarian akan kekuasaan. Kekuasaan bukanlah suatu wilayah melainkan suatu bentuk dan kondisi esensial dalam hubungan kemanusiaan. Oleh karena itu cara memahami kompleksitas kekuasaan dalam setiap peristiwa politik harus juga dilihat dari berbagai macam dimensi, baik material, psikologis, sosial yang diperebutkan oleh orang yang terlibat didalamnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Partai Golkar adalah bagaimana menjalin konsolidasi partai sampai pada tingkat yang paling bawah sehingga terbangun suatu tatanan internal partai yang kuat dan terarah. Persoalannya adalah sebagaimana partai politik lainnya, Partai Golkar juga tidak urung dari persoalan konflik yang melanda internal partai. Tingginya angka elektabilitas terhadap Partai Golkar memunculkan beragam spekulasi di tengah-tengah masyarakat, utamanya adalah pada tingkat konsolidasi dan pelebagaan partai. Konsolidasi Partai hanya dimungkinkan ketika kondisi partai sudah stabil dan berjalan dengan baik. Gejolak konflik internal yang melanda Partai Golkar di Riau.

3.2.1. Persaingan Mendekati yang Terkuat

Dualisme kepengurusan Partai Golkar di pusat, saat ini mulai menjalar ke Riau. Saat ini, ada dua tokoh sentral yang dinilai akan bersaing untuk menjadi pucuk tertinggi partai berlambang pohon beringin di Bumi Lancang Kuning. Kedua sosok itu merupakan gambaran dari dua kubu yang bertikai saat ini di pusat. Yang pertama adalah Arsyadjuliandi Rachman yang juga Gubernur Riau, pasca ditangkapnya Gubri nonaktif Annas Maamun. Sosok pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, adalah representasi dari kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan sosok lain, adalah mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Muchlis Adnan, yang saat ini mengklaim sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Partai Golkar, dari kubu Agung Laksono. Perpecahan dua kubu ini juga akan berdampak terhadap pemilihan ketua hingga pengurus Partai Golkar di

Riau. Ditambahkannya, bila melihat kondisi saat ini, Indra Muchlis Adnan, lebih diuntungkan. Hal itu seiring dengan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono.

Kehadiran Indra Muchlis Adnan, politisi Golkar Riau dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar versi Tim Penyelamat Partai Golkar yang dilaksanakan akhir pekan lalu di Jakarta, mendapatkan sorotan dari DPD II Golkar Rokan Hulu. Aksi mosi tak percaya disampaikan oleh sembilan dari sebelas DPD Tingkat II Partai Golkar se-Provinsi Riau, terhadap kepemimpinan Indra Muchlis Adnan di Golkar Riau, berbuah hasil. Indra kini dipecat dari kursi Ketua DPD I Partai Golkar Riau. Pemecatan Indra Muchlis Adnan, itu dibuktikan adanya SK penunjukkan Plt dari DPP Partai Golkar, yang diberikan kepada Darul Siska, mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Sebagai penerima, tentunya Darul harus menjalankan amanah untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Riau.

3.2.2. Dampak Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya

Musyawarah Nasional Partai Golkar, yang awalnya direncanakan April, diundur sampai 27 Mei 2016. Langkah ini diambil untuk memberi waktu penyesuaian setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali. Atmosfer dualisme di internal Partai Golkar tidak lagi terasa. Komitmen untuk terselenggaranya munas

benar-benar dijaga. Bahkan, Agung Laksono, ketua umum DPP Partai Golkar hasil munas Ancol, sudah setuju DPP Golkar hasil munas Bali menjadi panitia pelaksana munas ke 10. Secara informal saja, bahwa munas Golkar tetap digelar Mei. Paling lambat pertengahan Mei. Kepanitiaan munas yang mengakomodasi pengurus Ancol menunjukkan rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar benar-benar berjalan. Saat ini, DPP munas Bali memang sudah memenangkan gugatan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Namun, kesepakatan internal antara Agung, Aburizal, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah penyelesaian konflik Golkar harus melalui munas. Melalui munas tersebut, tegas Agung, akan lahir kepengurusan Golkar yang baru. Munas ini adalah salah satu cara untuk mempersatukan Partai Golkar dan memilih pengurus baru yang bersifat permanen.

Partai Golkar versi Musyawarah Nasional di Ancol Jakarta pimpinan Agung Laksono diminta menghormati putusan Kementerian Hukum dan HAM yang hanya mengakui Golkar hasil Munas Riau dengan Ketua Abu Rizal Bakrie. Konflik internal Partai Golkar, disadari atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi dan elektabilitas Partai Golkar di daerah. Bagi pengurus DPD I dan II serta kader Golkar di daerah, konflik internal ini memiliki efek yang luar biasa. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih, sehingga mereka merasakan betul bagaimana suasana kebatinan masyarakat terhadap Partai Golkar. Partai Golkar yang ada di daerah-daerah sebenarnya cukup berharap pada proses munas Partai Golkar.

Ini adalah momentum untuk menyatukan kembali Partai Golkar.

Suparman mengatakan bahwa Keputusan Menkumham mengakui Munas Riau. Indra Mukhlis Adnan sudah di-musyawarah luar biasa-kan sebagai Ketua Golkar Riau. Abu Rizal Bakrie juga sudah menyetujuinya. Hal itu menanggapi rencana musyawarah daerah oleh Golkar versi Agung Laksono yang mana di Riau dipimpin oleh Indra Muchlis Adnan. Musda dilakukan menindaklanjuti instruksi Agung Laksono hingga ke kabupaten/kota.

Sebelumnya diberitakan Golkar Riau versi Agung Laksono yang dipimpin Indra Muchlis Adnan akan melaksanakan Musda paling lambat sebelum bulan Maret 2015. Pada penyelenggaraan itu Indra akan mengundang seluruh DPD II, jika tidak ada yang hadir, Indra akan menunjuk Pelaksana Tugas Ketua 12 kabupaten/kota di Riau. Terkait statusnya yang sudah di-musdalubkan sebagai Ketua Golkar Riau dan tidak tercatat lagi sebagai pengurus, Indra menyatakan sampai saat ini belum menerima surat pemberhentian dari Mahkamah Partai Golkar. Sesuai Undang-Undang Parpol, pemberhentian harus dari Mahkamah Partai.

Di bagian lain, DPD I Golkar Riau siap mendukung ketua umum terpilih. Ketua DPD I Golkar Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa siapapun yang menjadi ketua umum DPP Golkar, kami wajib mendukungnya. Andi Rachman juga tak lupa menyampaikan apresiasi dan tahniah kepada Novanto. Terutama dalam berjalannya roda organisasi partai dengan tetap menjaga kekompakan agar lebih solid

lagi, menjadi harapan DPD Golkar Riau ke depan.

3.3. Konsolidasi Kepengurusan Partai Golkar

Salah satu putusan yang dibacakan hakim Mahkamah Partai adalah agar segera melakukan konsolidasi dan koordinasi partai di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ruspan Aman mengatakan bahwa Semua kegiatan yang akan dilakukan pada partai Golkar dipending dulu sampai ada keputusan tetap dari PTUN. Kalau ada yang melakukan pengukuhan untuk Riau itu namanya melawan hukum. Sudah jelas isinya menunda SK Menkumham, tidak boleh ada kegiatan yang mengatasnamakan Golkar. Apa yang dilakukan Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan, sudah jelas-jelas menyalahi aturan. Pasalnya untuk Golkar Riau yang sah adalah yang diketuai Plt DPD I Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Sesuai dengan putusan sela PTUN Jakarta, kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah merujuk hasil Munas Riau dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie. Sekarang yang sah itu Arsyadjuliandi Rachman

Dualisme kepemimpinan ini mulai berakhir sejak tercapainya kesepakatan untuk rekonsiliasi yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal tahun 2016. Kedua kubu juga sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada pertengahan tahun 2016. Dualisme kepemimpinan ini resmi berakhir pada 17 Mei 2016 dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum

DPP Partai Golkar yang baru dalam penyelenggaraan Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali.

Indra Muchlis Adnan juga mengatakan bahwa Melakukan konsolidasi partai dimulai dari tingkat II hingga ke tingkat I yang digelar pada 6/3/15 lalu. Dalam konsolidasi itu akan membahas juga jadwal penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) II dan I Partai Golkar di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Kami juga berharap semua menghentikan perbedaan dan konflik internal serta bersama-sama membangun Golkar, khususnya di Riau. Rekonsiliasi dan konsolidasi hanya bisa dicapai melalui Musda yang demokratis sesuai AD/ART.

3.3.1. Tahapan Konsolidasi

Kedua kubu sudah sepatutnya menyamakan persepsi tentang posisi Golkar pasca-Pilpres 2014. Seluruh kader Golkar harus kembali bersatu melakukan konsolidasi untuk menyusun program. Partai berlambang beringin harus kembali teduh mengayomi seluruh kader. Sebab, mengayomi, menyejahterakan rakyat, dan menyiapkan pemimpin berkualitas lebih penting ketimbang berkonflik.

Dualisme kepemimpinan Golkar di Pusat merembes ke pengurus DPD I Golkar Riau, dimana sebelumnya di beritakan bahwa Indra Muchlis Adnan yang pernah di lengserkan oleh Anas Maamun mengaku adalah ketua DPD I Golkar Riau yang Sah. Hal ini membuat pengurus DPD I Riau dibawah kendali Andi Rahman mengadakan konsolidasi pengurus partai dan anggota legislatif partai Golkar Riau yang

dilaksanakan pada Jum'at 27/03/2015 di hotel Pangeran dihadiri oleh pengurus di seluruh DPD II Kab/kota.

Sementara itu, pelantikan Andi Rachman sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau periode 2016-2021, digelar di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Pelantikan itu disertai dengan kegiatan buka bersama yang diikuti segenap pengurus dan kader Partai Golkar Riau. Dalam kesempatan itu, sejumlah pengurus DPD I Golkar Riau lainnya juga ikut dilantik. Di antaranya Ketua Harian Ruspan Aman, Sekretaris Rizaldi M Abrus, Wakil Ketua Bidang Organisasi Juni Rachman, Wakil Ketua Kaderisasi Gumpita. Begitu juga sejumlah ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Untuk Kota Pekanbaru dijabat Sahril, Kampar oleh Masnur, Rohul oleh Masgaol, Bappilu Dumai Abdul Vattah dan Ketua Bidang Hukum Hukum dan HAM Eva Nora serta Seni Pariwisata Erna Wirianti.

Dengan demikian, langkah Partai Golkar di Riau bisa lebih terarah dalam mencapai target yang diharapkan. Ada tiga hal yang mesti dilakukan meraih kemenangan, yakni melakukan konsolidasi, kaderisasi serta melaksanakan program untuk masyarakat. Ini harus dibuktikan kepada masyarakat. Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak semua pengurus partai Golkar Riau untuk bekerja secara bersama-sama memenangkan partai Golkar.

Gubernur Riau yang juga Ketua Partai Golkar Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman, menghadiri musyawarah daerah (musda) Partai Golkar ke-9. Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada seluruh politisi

dan kader Golkar agar dapat bersatu padu dalam menggapai harapan dan keinginan bersama. Pelaksanaan Musda Golkar Riau kali ini bertujuan sebagai langkah awal ajang pemanasan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan berlangsung di Jakarta, setelah dua kubu Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menyatu.

3.3.2. Akomodasi Kepentingan 2 Kubu

Pada perkembangannya, peran partai politik semakin menonjol dalam dinamika politik nasional, baik dalam konteks lokal/daerah, maupun nasional. Banyak kebijakan-kebijakan nasional ataupun kebijakan-kebijakan kepala daerah, dikeluarkan setelah mendengar masukan dari partai politik. Semakin strategisnya peran partai politik dalam tatanan baru tersebut, dapat dilihat dalam beberapa pemilu terakhir. Dimana, semakin menunjukkan bahwa masyarakat sangat menaruh harapan kepada partai politik dalam rangka perbaikan nasib bangsa ke depan.

Indra juga menegaskan akan segera melakukan konsolidasi partai dimulai dari tingkat II hingga ke tingkat I. Dalam konsolidasi itu akan membahas juga jadwal penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) II dan I Partai Golkar. Mantan Bupati Inhil dua periode ini mengatakan salah satu putusan yang dibacakan hakim MP kemarin adalah agar segera melakukan konsolidasi dan koordinasi partai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik dapat timbul dalam organisasi sebagai hasil dari adanya masalah terkait komunikasi, pribadi ataupun dari struktur organisasi. Seperti halnya di dalam partai politik, dimana adanya keterbatasan ataupun kesalahan dalam menjalankan organisasi yang tidak mampu mempertahankan jalannya organisasi tersebut. Maka, kekuasaan sekalipun tidak dapat mempengaruhinya untuk tetap ada di dalam organisasi partai politik. Konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik adalah gejala dari dinamika politik yang akhir-akhir ini terjadi baik dari pusat maupun daerah, seperti yang terjadi pada partai Golkar yang bermula dari pemberian mandat kepada Abu Rizal Bakrie namun mandat tersebut tidak dilaksanakan. Dan konflik tersebut semakin meruncing setelah adanya perbedaan pendapat antara kedua kubu tentang pelaksanaan waktu munas. Setelah itu terdapat dua kekuasaan di dalam partai Golkar. Masing-masing kubu tetap ingin mendapatkan kekuasaan yang penuh.

Dualisme kepemimpinan Partai Golkar di pusat, juga menjalar ke Riau. Ada dua tokoh sentral yang bersaing untuk menjadi pucuk tertinggi partai Golkar di Provinsi Riau. Kedua sosok itu merupakan gambaran dari dua kubu yang bertikai di pusat. Yang pertama adalah Arsyadjuliandi Rachman

yang juga Gubernur Riau, pasca ditangkapnya Gubri nonaktif Annas Maamun. Tokoh yang akrab disapa Andi Rachman ini, adalah representasi dari kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan tokoh lain adalah mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Muchlis Adnan, dari kubu Agung Laksono. Perpecahan dua kubu ini juga akan berdampak terhadap pemilihan ketua hingga pengurus Partai Golkar di Riau. Bila melihat kondisi saat ini, Indra Muchlis Adnan, lebih diuntungkan. Hal itu seiring dengan putusan Menkumham yang mengakui kepemimpinan kubu Agung Laksono.

Konsolidasi pengurus partai dan anggota legislatif partai Golkar Riau dihadiri oleh pengurus di seluruh DPD II Kab/kota di bawah kendali Arsyadjuliandi Rachman. Kondisi Partai Golkar sudah bersatu kembali, dimana tidak ada lagi dualisme kepemimpinan baik yang ada pada tingkat nasional maupun di daerah, khususnya Provinsi Riau.

B. Saran

Sebagai partai politik yang sudah besar dan berpengalaman di dunia politik, seharusnya partai Golkar dapat lebih bijaksana dalam menyelesaikan konflik internal partai tersebut. Dalam mencegah adanya perpecahan internal yang terjadi dalam tubuh partai perlu adanya penataan bagi partai politik baik dari luar maupun dari dalam partai. Dari dalam partai harus membuat UU yang bisa mencerminkan partai dan

harus disepakati bersama. Sedangkan dari luar akan tercipta dengan sendirinya melalui pandangan masyarakat. Kader-kader Partai Golkar harus dapat berkiprah secara nyata di tengah-tengah masyarakat, mampu menyerap, memadukan dan menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sebagai upaya dalam pemecahan berbagai masalah dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alkhatab, Umar Ibnu. 2009. *Dari Beringin ke Beringin (Sejarah, Kemelut, Resistensi dan Daya Tahan Partai Golkar)*. Yogyakarta: Ombak
- Arianto, Bismar dan Seprini. 2006. *Golkar & Politik Aklamasi (Dinamika Musda Partai Golkar Riau)*. Pekanbaru: Indonesia Society for Democracy and Peace
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Gatara, A.A. Sahid. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia

Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit PPM

Lexy, J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Ritzer, George. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way (Survival Partai Golkar di Tengah Turbelensi Politik Era Transisi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Yuda, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C. Surat Kabar

Kompas. 8 Maret 2016. "Munas Golkar Diundur Mei, Penyelenggara dan Peserta Belum Diputuskan", hal.2

Riau Pos. 25 Maret 2016. "Munas Golkar Digelar Mei", hal.12

Kompas. 1 April 2016. "Partai Golkar Persiapkan Munas", hal.2

Kompas. 18 April 2016. "Munas Golkar kembali di undur", hal.4

Riau Pos. 8 Mei 2016. "Golkar Perlu Pemimpin yang Komit", hal.6

Riau Pos. 15 Mei 2016. "Buka Munaslub Golkar, Presiden Sebut Luhut-JK", hal.1

Riau Pos. 17 Mei 2016. "Golkar Resmi Keluar dari KMP", hal.1

Riau Pos. 18 Mei 2016. "Golkar Riau Dukung Setya Novanto", hal.11

D. Jurnal dan Skripsi

Deny Rendra dan Hery Suryadi. Dinamika pergeseran kekuasaan politik di dpd partai demokrat provinsi riau. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 67-147.

Sanur, Debora. Dinamika internal partai golkar dan dampaknya terhadap kinerja DPR RI. *Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan*

- Informasi (P3DI)*, Vol. VI, No. 23/I/P3DI/Desember/2014.
- Sudirman. Dinamika politik lokal dalam social capital (modal sosial). *Jurnal Academica Fisip Untad*, VOL.04 Nomor 01 Februari 2012.
- Zalpha, Yulion. Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014. *Jurnal Intizar*, Vol. 22, Nomor 1, 2016.
- Brian Andry Jatmiko. 2010. “*Dinamika Politik Partai Golkar 1998-2004*”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- E. Website**
- <http://merantionline.com/berita/detail/14323/2015/01/04/dualisme-pimpinan-partai-golkar-riau-memanas>. Diakses pada tanggal 20 September 2016
- <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150518162628-32-53969/kepemimpinan-golkar-kembali-ke-kepengurusan-riau>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2016
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/20300001/Bayang-bayang.Putusan.MA>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2016
- <http://riaumandiri.co/mobile/detailberita/36780/setnov-percaya-andi-pilih-cawagub.html>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2016
- <http://harianhaluan.com/news/detail/39674/ruspan-aman-serang-korwil-sumatera>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
- <http://riaumandiri.co/read/detail/9457/ruspan-indra-saling-serang.html>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016
- <https://www.goriau.com/berita/riau/jelang-serah-terima-ke-indra-adnan-kantor-dpd-i-partai-golkar-riau-masih-sepi.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016
- <http://www.riauterkini.com/politik.Dihadiri-Sekjen-DPP Idrus-Marham-Musda-Golkar-DPD-Riau-Resmi-Dibuka-Syarif-Tjitip-Sutarjo>. Diakses pada tanggal 5 November 2016
- <http://news.liputan6.com/read/2537081/pesanan-setnov-untuk-ketua-baru-dpd-golkar-riau>. Diakses pada tanggal 07 November 2016
- [http://politik.rmol.co/read/2016/06/06/248960/Teka-Teki-Munaslub-Golkar-Dan-Dinamika-Politik-\(6-Habis\)](http://politik.rmol.co/read/2016/06/06/248960/Teka-Teki-Munaslub-Golkar-Dan-Dinamika-Politik-(6-Habis)). Diakses pada tanggal 11 November 2016
- <http://rimanews.com/nasional/politik/read/20150420/208347/Golkar-PPP-Kisruh-Soal-Pilkada-Ini-Saran-Mahfud-MD-Pada-KPU>. Diakses pada tanggal 20 November 2016
- <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/53941/dinamika-politik-dan-masa-depan-golkar>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016
- <http://www.kompasiana.com/kangagun/penyelesaian-konflik-politik-mengacu-pada-uu-parpol-dan-ad-art>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2016